



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA
DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN
Jl.Pattimura No.20 Kebayoran Baru-Jakarta Selatan 12110 Telp./Fax(021)72797233

Nomor : Ku.0503-6/509
Lampiran :

Jakarta, 2 April 2013

Kepada Yth.
Bupati/Walikota
(Daftar Terlampir)
Di Tempat

Perihal : **Pelaksanaan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PNPM Mandiri Perkotaan pada DIPA Satker PIP Kabupaten/Kota TA. 2013**

Sehubungan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan Tahun Anggaran 2013 dan dalam rangka menindaklanjuti:

1. Surat Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Nomor B.200/MENKO/KESRA/X/2012 tanggal 5 Oktober 2012 perihal Penetapan Daftar Lokasi dan Alokasi PNPM Mandiri TA. 2013;
2. Surat Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum, Nomor KU.08.04/DC/697.1, tanggal 19 November 2012, perihal Usulan Pejabat Satuan Kerja Pembangunan Infrastruktur Permukiman (PIP) Kabupaten/Kota Tahun 2013;
3. Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Satuan Kerja PIP Tahun Anggaran 2013;

berikut kami sampaikan kategori BLM dan pemanfaatan BLM untuk pengembangan kapasitas masyarakat beserta rincian daftar lokasi dan alokasi per kelurahan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kategori BLM PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2013

- a. Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tahun 2013 akan mencairkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Lanjutan dan Reguler.
- b. BLM Lanjutan Ta. 2013 adalah BLM yang dialokasikan untuk memenuhi kekurangan tahap pencairan tahun sebelumnya.
- c. BLM Reguler TA. 2013 adalah BLM Pagu Reguler Tahun 2013, dicairkan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan.
- d. Apabila masih terdapat dana pada DIPA Satker PIP Tahun 2013 setelah tahapan lanjutan dan regular tahun terpenuhi sebelum berakhirnya tahun anggaran 2013, maka Kepala Satker PIP Kabupaten/Kota dapat melanjutkan dengan pencairan tahap berikutnya sebagai bagian dari upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Lokasi sasaran ditetapkan oleh Satker PIP berdasarkan kinerja masing-masing kelurahan.
- e. Rincian lokasi PNPM Mandiri Perkotaan beserta alokasi dan kategori BLM per kelurahan dapat dilihat pada Lampiran 2.

2. Pemanfaatan BLM untuk Pengembangan Kapasitas Masyarakat

- a. Alokasi BLM Reguler Tahap 1 dimanfaatkan untuk dana pengembangan kapasitas masyarakat sebesar Rp. 10 juta. Sisanya digunakan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan dalam Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) sesuai Rencana Tahunan (Renta) 2013 dan Biaya Operasional (BOP) BKM.

- b. Kegiatan pengembangan kapasitas terdiri dari pelatihan dan sosialisasi dengan rincian kegiatan dan harga satuan seperti terdapat pada Lampiran 3.
3. Tata cara pencairan BLM, termasuk dana pengembangan kapasitas masyarakat dan BOP BKM, mengacu pada Petunjuk Teknis Pendampingan Pencairan dan Pemanfaatan BLM (dapat diunggah di lama PNPM Mandiri Perkotaan dengan alamat www.pnpm-perkotaan.org/pustaka.asp?catid=1&).
4. Khusus untuk Kabupaten/Kota yang berada di Wilayah Pulau Sumatera, Provinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Kalimantan Barat, sambil menunggu proses revisi pelepasan blokir (bintang) di DIPA Satker PIP Kabupaten/Kota, Kepala Satker PIP diminta untuk mendorong penguatan kemandirian BKM dalam bentuk kemitraan atau channeling program.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

DIREKTUR
PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN



[Handwritten Signature]
Ir. Guratno Hartono, MBC, *[Initials]*
NIP. 195508151982031004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya (sebagai laporan).
2. Kepala Satker PBL Provinsi.
3. Kepala Satker PIP Kabupaten/Kota.

Lampiran 1 Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan DJCK

Nomor : KU.0503 - Cb/S09
Tanggal : 2 April 2013
Perihal : Daftar Rincian Lokasi dan Alokasi Dana Bantuan Langsung Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan T.A. 2013

DAFTAR TUJUAN SURAT

PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

1. Bupati Aceh Selatan
2. Bupati Aceh Tenggara
3. Bupati Aceh Tengah
4. Bupati Aceh Barat
5. Bupati Aceh Besar
6. Bupati Pidie
7. Bupati Aceh Tamiang
8. Walikota Banda Aceh
9. Walikota Sabang
10. Walikota Lhokseumawe
11. Walikota Subulussalam

PROVINSI SUMATERA UTARA

1. Bupati Labuan Batu
2. Bupati Asahan
3. Bupati Simalungun
4. Bupati Dairi
5. Bupati Karo
6. Bupati Deli Serdang
7. Bupati Langkat
8. Walikota Sibolga
9. Walikota Tanjung Balai
10. Walikota Pematang Siantar
11. Walikota Tebing Tinggi
12. Walikota Medan
13. Walikota Binjai
14. Walikota Padangsidempuan

PROVINSI SUMATERA BARAT

1. Bupati Sijunjung
2. Bupati Padang Pariaman
3. Bupati Agam
4. Bupati Lima Puluh Koto
5. Walikota Padang
6. Walikota Solok
7. Walikota Sawah Lunto
8. Walikota Padang Panjang
9. Walikota Bukittinggi
10. Walikota Payakumbuh
11. Walikota Pariaman

PROVINSI RIAU

1. Walikota Pekanbaru
2. Walikota Dumai
3. Bupati Kuantan Singingi
4. Bupati Indragiri Hilir
5. Bupati Bengkalis



PROVINSI KEPULAUAN RIAU

1. Bupati Karimun
2. Bupati Bintan
3. Walikota Batam
4. Walikota Tanjung Pinang

PROVINSI SUMATERA SELATAN

1. Walikota Palembang
2. Walikota Prabumulih
3. Walikota Pagar Alam
4. Walikota Lubuk Linggau
5. Bupati Ogan Komering Ulu
6. Bupati Ogan Komering Ilir
7. Bupati Muara Enim

PROVINSI JAMBI

1. Walikota Jambi
2. Walikota Sungai Penuh

PROVINSI BENGKULU

1. Bupati Bengkulu Selatan
2. Bupati Rejang Lebong
3. Walikota Bengkulu

PROVINSI BANGKA BELITUNG

1. Bupati Bangka
2. Bupati Belitung
3. Bupati Bangka Barat
4. Bupati Belitung Timur
5. Walikota Pangkal Pinang

PROVINSI LAMPUNG

1. Walikota Bandar Lampung
2. Walikota Metro
3. Bupati Pringsewu
4. Bupati Lampung Utara

PROVINSI BANTEN

1. Bupati Pandeglang
2. Bupati Lebak
3. Bupati Tangerang
4. Walikota Tangerang
5. Walikota Tangerang Selatan
6. Walikota Cilegon
7. Walikota Serang

PROVINSI DKI JAKARTA

1. Bupati Kepulauan Seribu
2. Walikota Jakarta Selatan
3. Walikota Jakarta Timur
4. Walikota Jakarta Pusat
5. Walikota Jakarta Barat
6. Walikota Jakarta Utara

PROVINSI JAWA BARAT

1. Bupati Sukabumi
2. Bupati Cianjur
3. Bupati Bandung
4. Bupati Tasikmalaya
5. Bupati Majalengka
6. Bupati Purwakarta
7. Bupati Karawang



8. Walikota Bogor
9. Walikota Sukabumi
10. Walikota Bandung
11. Walikota Cirebon
12. Walikota Bekasi
13. Walikota Depok
14. Walikota Cimahi
15. Walikota Tasikmalaya
16. Walikota Banjar
17. Bupati Sumedang
18. Bupati Subang
19. Bupati Bandung Barat
20. Bupati Indramayu
21. Bupati Kuningan
22. Bupati Ciamis
23. Bupati Garut
24. Bupati Cirebon
25. Bupati Bekasi
26. Bupati Bogor

PROVINSI JAWA TENGAH

1. Bupati Cilacap
2. Bupati Banyumas
3. Bupati Purbalingga
4. Bupati Banjarnegara
5. Bupati Purworejo
6. Bupati Wonosobo
7. Bupati Magelang
8. Bupati Klaten
9. Bupati Karanganyar
10. Bupati Grobogan
11. Bupati Blora
12. Bupati Rembang
13. Bupati Kudus
14. Bupati Jepara
15. Bupati Demak
16. Bupati Temanggung
17. Bupati Pekalongan
18. Bupati Pemasang
19. Bupati Tegal
20. Bupati Brebes
21. Walikota Magelang
22. Walikota Surakarta
23. Walikota Salatiga
24. Walikota Semarang
25. Walikota Pekalongan
26. Walikota Tegal
27. Bupati Pati
28. Bupati Batang
29. Bupati Kebumen
30. Bupati Wonogiri
31. Bupati Boyolali
32. Bupati Semarang
33. Bupati Kendal
34. Bupati Sragen
35. Bupati Sukoharjo

PROVINSI DI YOGYAKARTA

1. Bupati Kulon Progo
2. Bupati Bantul
3. Bupati Sleman
4. Walikota Yogyakarta


PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bupati Pacitan
2. Bupati Ponorogo
3. Bupati Trenggalek
4. Bupati Malang
5. Bupati Lumajang
6. Bupati Probolinggo
7. Bupati Pasuruan
8. Bupati Sidoarjo
9. Bupati Nganjuk
10. Bupati Madiun
11. Bupati Magetan
12. Bupati Bojonegoro
13. Bupati Tuban
14. Bupati Lamongan
15. Bupati Gresik
16. Bupati Pamekasan
17. Walikota Kediri
18. Walikota Blitar
19. Walikota Malang
20. Walikota Probolinggo
21. Walikota Pasuruan
22. Walikota Mojokerto
23. Walikota Madiun
24. Walikota Surabaya
25. Walikota Batu
26. Bupati Banyuwangi
27. Bupati Sumenep
28. Bupati Kediri
29. Bupati Tulungagung
30. Bupati Blitar
31. Bupati Bangkalan
32. Bupati Bondowoso
33. Bupati Jombang
34. Bupati Mojokerto
35. Bupati Jember
36. Bupati Situbondo

PROVINSI BALI

1. Bupati Badung
2. Bupati Gianyar
3. Bupati Klungkung
4. Kab Buleleng
5. Walikota Denpasar

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

1. Bupati Lombok Tengah
 2. Bupati Lombok Timur
 3. Walikota Mataram
 4. Walikota Bima
 5. Bupati Lombok Barat
 6. Bupati Sumbawa
- 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1. Bupati Sumba Barat
2. Bupati Sumba Timur
3. Bupati Ende
4. Walikota Kupang
5. Bupati Timor Tengah Selatan
6. Bupati Belu
7. Bupati Sikka
8. Bupati Ngada
9. Bupati Manggarai

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

1. Bupati Sambas
2. Bupati Bengkayang
3. Walikota Pontianak
4. Walikota Singkawang
5. Bupati Ketapang

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

1. Bupati Kotawaringin Timur
2. Walikota Palangkaraya

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

1. Bupati Tanah Laut
2. Bupati Hulu Sungai Selatan
3. Bupati Hulu Sungai Tengah
4. Bupati Tabalong
5. Walikota Banjarmasin
6. Walikota Banjar Baru
7. Bupati Kota Baru
8. Bupati Banjar
9. Bupati Barito Kuala
10. Bupati Hulu Sungai Utara

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. Bupati Pasir
2. Bupati Kutai Kertanegara
3. Bupati Berau
4. Bupati Bulungan
5. Walikota Balikpapan
6. Walikota Samarinda
7. Walikota Tarakan
8. Walikota Bontang
9. Bupati Malinau
10. Bupati Nunukan

PROVINSI SULAWESI UTARA

1. Bupati Kepulauan Sangihe
2. Bupati Minahasa Utara
3. Walikota Manado
4. Walikota Bitung
5. Walikota Tomohon
6. Walikota Kotamobagu
7. Bupati Minahasa

PROVINSI GORONTALO

1. Bupati Gorontalo

PROVINSI SULAWESI TENGAH

1. Bupati Poso
2. Bupati Toli-Toli
3. Walikota Palu

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

1. Bupati Muna
2. Walikota Kendari
3. Walikota Bau-Bau
4. Bupati Kolaka

PROVINSI SULAWESI SELATAN

1. Bupati Selayar
2. Bupati Bantaeng
3. Bupati Sinjai
4. Bupati Maros
5. Bupati Wajo
6. Bupati Sidendreng Rappang
7. Walikota Pare-Pare
8. Walikota Palopo
9. Walikota Makasar
10. Bupati Bulukumba
11. Bupati Gowa
12. Bupati Bone
13. Bupati Pinrang
14. Bupati Toraja Utara

PROVINSI SULAWESI BARAT

1. Bupati Majene
2. Bupati Polewali Mandar

PROVINSI MALUKU

1. Walikota Ambon
2. Walikota Tual
3. Bupati Maluku Tengah

PROVINSI MALUKU UTARA

1. Walikota Ternate
2. Walikota Tidore Kepulauan

PROVINSI PAPUA

1. Walikota Jayapura

PROVINSI PAPUA BARAT

1. Bupati Manokwari
2. Walikota Sorong

Lampiran 3 Surat Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan

Nomor : KU.0503 - Cb/509

Tanggal : 2 April 2013

Perihal : Peningkatan Kapasitas Masyarakat Tahun 2013 untuk Mendukung Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan

Jenis-Jenis dan Alokasi Dana Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat
PNPM Mandiri Perkotaan
Tahun 2013

| No | Jenis Peningkatan Kapasitas | Jumlah hari | Jumlah Peserta | Biaya | Pengganti Transport | Biaya narasumber | Bahan serahan | Total Biaya | Keterangan |
|---|--|-------------|----------------|--------|---------------------|------------------|---------------|-------------------|----------------------|
| 1 | Pelatihan KSM | 2 | 27 | 20.000 | | 215.000 | 10.000 | 1.565.000 | Paket Kelurahan |
| 2 | Paket Pengembangan Media Warga | | | | | | | 3.000.000 | Paket selama 1 tahun |
| 3 | Pelatihan penguatan BKM / UP/Aparat Kel | 3 | 25 | 20.000 | - | 100.000 | 10.000 | 1.850.000 | Paket Kelurahan |
| 4 | Pelatihan RT/RW | 2 | 30 | 20.000 | - | 100.000 | 10.000 | 1.600.000 | Paket Kelurahan |
| 5 | pelatihan penguatan sekretariat/Dewan pengawas/UPK | 3 | 4 | 20.000 | 15.000 | 100.000 | 10.000 | 560.000 | Paket Kluster/Kec. |
| 6 | Pelatihan Penguatan UPL | 3 | 2 | 20.000 | 15.000 | 100.000 | 10.000 | 330.000 | Paket Kluster/Kec. |
| 7 | Pelatihan Penguatan UPS | 3 | 2 | 20.000 | 15.000 | 100.000 | 10.000 | 330.000 | Paket Kluster/Kec. |
| 8 | Pelatihan Forum Komunikasi BKM | 2 | 2 | 30.000 | 20.000 | 100.000 | 10.000 | 320.000 | Paket Kluster/Kab |
| 9 | Pelatihan relawan | 3 | 3 | 20.000 | 15.000 | 100.000 | 10.000 | 445.000 | Paket Kluster/Kec. |
| Total dana setiap Kelurahan/Desa | | | | | | | | 10.000.000 | |